

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1.Landasan Teori

Melalui penelitian ini, penulis mengangkat beberapa teori yang relevan dengan judul penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Indeks pembangunan ekonomi inklusif yang baik dapat didukung oleh beberapa faktor diantaranya pembangunan ekonomi yang merata, kemiskinan yang terus menurun, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup yang tinggi dan investasi yang tinggi. Melalui faktor-faktor tersebut dapat membantu mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Melalui teori-teori yang relevan dapat membantu dalam menganalisis bagaimana setiap faktor dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod-Domar menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan dari pembentukan modal (investasi) sebagai faktor utama, dengan asumsi perekonomian dalam keadaan penuh kerja dan rasio modal-output yang tetap. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pengembangan dari ekonomi berkelanjutan yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengertian ekonomi inklusif dapat

didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ekonomi inklusif adalah pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada menciptakan peluang ekonomi yang baru, tetapi juga melalui ekonomi inklusif juga memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat terkhusus untuk masyarakat miskin. Tujuan capaian ekonomi inklusif adalah menurunkan kemiskinan dalam perekonomian.

Terdapat dua pilar strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu yang pertama pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan peluang ekonomi dan yang kedua yaitu inklusi sosial untuk memastikan akses yang sama terhadap peluang. Dua pilar strategis tersebut dapat memungkinkan negara berkembang dapat mengatasi masalah kemiskinan yang esktrim dan mengatasi tantangan pembangunan yang disebabkan oleh ketimpangan.

Ekonomi inklusif didefinisikan beberapa pendekatan yang berbeda oleh beberapa Lembaga. Berikut terdapat tiga metode yang didefinisikan oleh tiga lembaga diantaranya :

1. Ekonomi Inklusif Menurut *Asian Development Bank* (ADB)

Asian Development Bank (ADB) menggunakan beberapa variabel pokok untuk pengukuran. Berikut terdapat beberapa contoh indikator pengukuran diantaranya :

Pertumbuhan Ekonomi : Pertumbuhan PDRB per kapita

Kemiskinan : Presentase penduduk miskin

Kesehatan dan Nutrisi : Angka harapan hidup

Pendidikan : Angka harapan sekolah

2. Ekonomi Inklusif Menurut *World Economic Forum*

Menurut *World Economic Forum* terdapat tujuh pilar indikator pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu :

- 1) Variabel pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah
- 2) Variabel pelayanan umum dengan indikator akses air bersih, listrik dan sanitasi
- 3) Variabel korupsi dengan indikator indeks anti korupsi
- 4) Variabel kepemilikan aset dengan indikator presentase kepemilikan rumah
- 5) Variabel ketenagakerjaan dengan indikator tingkat pengangguran terbuka

- 6) Variabel perlindungan sosial dengan indikator pembiayaan raskin
 - 7) Variabel intermediasi keuangan dengan indikator presentase Pembentukan Modal tetap Bruto (PTMB) terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB)
3. Ekonomi Inklusif Menurut *International Policy Centre fo Inclusive Growth* (IPCIG) – UNDP

Pendekatan melalui *International Policy Centre fo Inclusive Growth* (IPCIG) – UNDP relative lebih sederhana jika dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya. Pada pendekatan ini hanya menggunakan tiga variabel dalam pengukuran yaitu kemiskinan, ketimpangan dan ketenagakerjaan.

2.1.1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS 2018) indeks pembangunan ekonomi inklusif dapat di definisikan sebagai Pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam keadilan secara merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pada seluruh masyarakat dan wilayah. Bappenas mengukur indeks pembangunan ekonomi inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Pembangunan Ekonomi terdiri dari tiga pilar, 8 sub pilar dan 21 indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pilar Pertama : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Dalam pilar pertama dapat dijelaskan melalui tiga pilar yaitu :

- A. Sub pilar 1 pada pilar 1: Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran aktivitas ekonomi suatu daerah dalam tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Dalam sub pilar ini terdapat tiga indikator yaitu pertumbuhan PDB/PDRB Rill perkapita, share manufaktur terhadap PDRB dan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal.
- B. Sub pilar 2 pada pilar 1 : Kesempatan kerja merupakan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Terdapat tiga indikator kesempatan kerja diantaranya tingkat kesempatan kerja (TKK), penduduk bekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja lebih dari 32 jam per minggu dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.
- C. Sub pilar 3 pada pilar 1: Pada sub pilar ini dapat dilihat melalui infrastuktur ekonomi yang memperluas akses terhadap masyarakat dalam manfaat tingginya pertumbuhan ekonomi. Indikator yang terdapat dilamnya yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN, Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, dan persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.

2. Pilar kedua : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Dalam pilar kedua terdapat dua sub pilar didalamnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sub pilar 1 pada pilar 2 : Ketimpangan wilayah ditimbulkan oleh perbedaan tingkat pembangunan diberbagai daerah (Sukirno, 2010). Pada sub pilar ini terdapat tiga indikator dalam pengukurannya yaitu rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio pengeluaran rumah tangga desa dan kota.

B. Sub pilar 2 pada pilar 2 : Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi inklusif. Karena jika tingginya pembangunan ekonomi dibarengi dengan tingginya kemiskinan maka tidak akan mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan. Indikator yang mencerminkan sub pilar ini adalah persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3. Pilar Ketiga : Perluasan Akses dan Kesempatan

Dalam pilar ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat secara adil. Dalam pilar ini terdapat tiga pilar dan beberapa indikator didalamnya diantaranya :

A. Sub pilar 1 pada pilar 3 : Kapabilitas manusia itu tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan sejahtera. Terdapat tiga indikator pada sub pilar ini meliputi angka harapan lama sekolah, presentase balita

yang mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap dan presentase yang memiliki jaminan kesehatan.

B. Sub pilar 2 pada pilar 3 : Infrastruktur yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat terdapat cerminan dari perluasan akses yang baik. Terdapat dua indikator yang dapat diukur didalamnya yaitu presentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak dan presentase rumah tangga dengan tempat buang air sendiri.

C. Sub pilar 3 pada pilar 3 : Keuangan inklusif dapat berfungsi sebagai intermediasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua indikator pengukur yaitu rasio jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif dan rasio perbankan UMKM.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, terutama pada negara berkembang dan negara yang tertinggal. Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara kurangnya peluang meningkatkan kesejahteraan pada lingkungan sekitarnya Menurut Jeffrey Sachs (2016) kemiskinan yang mendalam merupakan penghalang utama terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, karena hal tersebut menghalangi individu untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. World Bank (1990) Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam

perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum. Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan serta dapat terancamnya hak dan keadilan. Menurut Kotambunan (2016) kemiskinan dapat dilihat dari tiga kelompok yaitu kelompok sisi pendapatan (*income property*), kekurangan materi dan pendapatan.

Menurut Harniati (2010), para ahli mengklasifikasikan kemiskinan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Kemiskinan alamiah : kemiskinan ini disebabkan rendahnya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Rendahnya sumber daya menyebabkan juga rendahnya produktivitas.
2. Kemiskinan kultural : kemiskinan ini disebabkan oleh sikap individu ataupun kelompok masyarakat yang tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya sekalipun ada pihak lain yang membantunya.
3. Kemiskinan struktural : kemiskinan ini disebabkan oleh struktural atau tatanan kelembagaan dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan seringkali menyebabkan masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Menurut Sunyoto (2006) konsep kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Kemiskinan absolute : konsep ini dirumuskan dengan ukuran tertentu yang kongkret, ukuran ini mengacu pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Pada konsep absolute garis batas kemiskinan dapat dikenali karena ukurannya dapat dipastikan.
2. Kemiskinan relatif : konsep ini dirumuskan dengan dimensi tempat dan waktu. Asumsi dari konsep ini adalah kemiskinan dan waktu kemiskinannya suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Dalam konsep ini kemiskinan lazimnya diukur dengan orientasi pada derajat kekayaan hidup. Kekurangan pada konsep ini adalah sulitnya menentukan bagaimana kelayakan hidup.
3. Kemiskinan subyektif : konsep ini dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal atau memperhitungkan kemiskinan. Kemiskinan dinilai dari anggapan terhadap sebuah kelompok dapat dinilai miskin atau tidaknya.

2.1.2.2 Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan menurut Keynes berfokus pada peran pengangguran dan rendahnya permintaan agregat sebagai penyebab utama kemiskinan. Keynes berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi tidak mampu secara otomatis menyesuaikan diri, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi, yang mendorong kemiskinan. Teori kemiskinan memiliki dua paradigma

yang memberikan pemahaman mengenai teori kemiskinan. Dua paradigma tersebut adalah paradigma Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Kedua paradigma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Paradigma Neo-Liberal

Melalui paradigma ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang terjadi akibat dari pilihan individu tersebut. Menurut pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Menurut paradigma ini penanggulangan kemiskinan itu bersifat sementara dan peran pemerintah sangat minimum. Peran tersebut baru digunakan pada saat institusi-institusi masyarakat tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan pendekatan ini digunakan sebagai kajian teori kemiskinan. Salah satu indikator dari paradigma ini adalah pendapatan nasional (GNP), pada semenjak 1950 digunakan sebagai indikator pembangunan. Menurut Satterwhaite (1997) paradigma ini memiliki kelemahan yaitu terlalu memandang kemiskinan dari pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subjek penyebab kemiskinan. Karena hal tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian dari masyarakat mengenai bentuk-bentuk kemiskinan dan juga karena hal ini akar permasalahan mengenai kemiskinan sulit ditemukan.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai persoalan struktural dan bukan sebagai persoalan individu. Pada paradigma ini peran negara atau pemerintah diperlukan untuk memberikan jaminan terhadap individu untuk berpartisipasi dalam transaksi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani oleh lembaga misalnya dengan cara adanya program jaminan sosial.

Paradigma ini juga memiliki kelemahan yaitu masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara atau lembaga dalam menanggulangi kemiskinan padahal penanggulangan kemiskinan juga tergantung dengan kontribusi positif dari masyarakat miskin. Akan tetapi, pendekatan ini mengungkapkan dimensi lain dari

Hal lain dari penyebab kemiskinan, yaitu struktur dan institusi, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka dari itu melalui paradigma ini dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan tidak hanya tentang kemampuan individu, tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemerdekaan dan kebebasan.

2.1.3 Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang penting terhadap dalam membentuk kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan kemampuan agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Sadono Sukirno (2017), dengan pendidikan formal akan memberikan hasil yang berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk pengembangan sumber daya manusia untuk memaksimalkan kualitas hidup sumber daya. Menurut Edward dan Schultz (1970), manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Pendidikan bisa dianalisis oleh beberapa indikator, salah satunya adalah rata-rata lama sekolah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) rata-rata lama sekolah adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menyelesaikan pendidikan formal. Dalam perhitungan RLS siswa yang tidak naik kelas atau mengulang kelas tidak termasuk kedalam perhitungan. Secara umum RLS menunjukan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk pada suatu wilayah, yang dapat dilihat sebagai perantara untuk melihat aspek kualitatif dan kuantitatif dari sumber daya manusia. Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) batas maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun atau setara dengan Sekolah

Menengah Atas (SMA) dan batas minimumnya adalah 0 tahun. rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari pendidikan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi juga tingkat kualitas seseorang.

2.1.4 Angka Harapan Hidup

2.1.4.1 Pengertian Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu komponen dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pengukuran indeks pencapaian dari kemampuan dasar pembangunan manusia yang dilakukan melalui tiga pendekatan dimensi dasar yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan atau wawasan dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik secara fisik, mental maupun spiritual. Menurut Amartya Sen (1990) menyatakan bahwa pembangunan manusia berarti perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut antara lain mencakup makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Jika kebutuhan dasarnya dipenuhi, maka manusia dapat secara bebas berkontribusi bagi pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan manusia adalah revolusi industri, yang secara drastis mengubah cara hidup dan cara kerja manusia.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata dari perkiraan banyak tahun

yang dihabiskan oleh individu semasa hidup. Penggunaan indikator ini didasarkan pada fakta bahwa umur panjang adalah hal yang berharga dan dapat dicapai jika seseorang memperoleh nutrisi yang cukup dan memiliki kesehatan yang baik. AHH (Asia Harapan Hidup) dihitung dengan pendekatan tak langsung (estimasi tidak langsung) dan distandardisasi menggunakan metode penghitungan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Peningkatan AHH mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga membaik. Ada empat kategori yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu faktor lingkungan (40 persen), faktor perilaku (30 persen), faktor layanan kesehatan (20 persen), dan faktor genetik (10 persen). Hal ini menggambarkan bahwa derajat Kesehatan dapat mempengaruhi capaian angka harapan hidup dengan umur panjang dan sehat.

2.1.5 Ketimpangan Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah dan populasi yang tidak merata. Hal ini berarti sebagian populasi menguasai sebagian besar sumber daya sedangkan sebagian lainnya hanya memiliki akses yang terbatas. Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan ekonomi dapat diartikan sebagai standar hidup yang relatif bagi seluruh masyarakat yang disebabkan oleh kesenjangan antar wilayah yang diakibatkan perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator yaitu diantaranya indeks rasio gini, rasio pendapatan dan kurva lorenz.

2.1.5.2 Pengertian Indeks Rasio Gini

Indeks rasio gini atau biasa disebut sebagai koefisien gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Manfaat dari pengukuran ini adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi secara menyeluruh. Indeks ini dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi yang merata. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana:

- Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, artinya semua individu memiliki pendapatan yang sama.
- Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, di mana satu individu menguasai seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki pendapatan sama sekali.

2.1.6 Investasi

2.1.6.1 Pengertian Investasi

Teori Keynes adalah teori investasi yang menjelaskan tentang tentang suatu perekonomian campuran yang dimana sektor swasta dan negara memegang peran yang penting. Teori Keynes berpendapat bahwa jumlah investasi tidak bergantung pada pengembalian akan tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat suku bunga dan inflasi, jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja melainkan beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi.

Pengertian mengenai investasi itu sendiri merupakan proses merancang modal dengan tujuan mendapatkan hasil yang seimbang di masa depan. Kegiatan ini melibatkan pengeluaran uang atau sumber daya lainnya untuk membeli aset yang diharapkan akan meningkat nilainya. Investasi merupakan salah satu cara untuk memperbesar kekayaan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dalam konteks ekonomi, investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Investasi dapat diukur melalui Penanaman Modal Asing (PMS) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian dan Sumber	Variabel Penelitian	Metode dan Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wulan Retno Hapsari (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah presentase penduduk miskin, angka harapan hidup, angka melek	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pertumbuhan	Hasil penelitian ini adalah Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Inklusif Growth Index (IGI). Berdasarkan hasil IGI di Kabupaten/Kota di Provinsi

	<p>Provinsi Jawa Tengah. Sumber : Jurnal Litbang Sukowati, Volume 3 No. 1. November 2019</p>	<p>huruf, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka dan variabel terikatnya Laju pertumbuhan ekonomi inklusif</p>	<p>ekonomi inklusif telah terjadi di kabupaten dan kota di wilayah provinsi Jawa Tengah. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Jawa Tengah, enam Kabupaten/Kota termasuk dalam kategori sangat memuaskan, dua puluh lima Kabupaten/Kota berada dalam kategori memuaskan, dan empat Kabupaten masuk dalam kategori kurang memuaskan dalam pertumbuhan ekonominya.</p>
2.	<p>Cielito F. Habito (2009). Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis. Sumber : <i>Asian Development Bank Institute</i></p>	<p>Variabel bebas pada penelitian ini adalah kemiskinan, ketimpangan dan pendapatan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah perumbuhan ekonomi inklusif.</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemiskinan, ketimpangan dapat berpengaruh terhadap ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Hasil penelitian ini didapatkan dengan menghitung <i>Panel Estimation Generalized</i> dari data panel negara-negara Asia dalam dua periode (1990-1996 dan 2000-2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan, pengeluaran publik pada layanan sosial, dan komposisi sektor PDB secara signifikan</p>

			metode analisis data panel.	mempengaruhi pertumbuhan inklusivitas ekonomi di negara-negara Asia, dengan kualitas pemerintahan menjadi faktor paling rendah.
3.	Tella, Sherriffdeen A dan Alimi Olorunfemi (2016). <i>Determinants of Inclusive Growth in Africa: Role of Health and Demographic Changes</i> . Sumber : Jurnal Tinjauan Ekonomi Afrika, Volume IV, Edisi 2, Juli 2016.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>gross domestic product per person employed (GDPPE)</i> <i>measuring growth inclusiveness</i> , <i>initial income per capita (RGDPPC)</i> , <i>real total health expenditure per capita (RTHEPC)</i> ,	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif di Afrika. Metode <i>fixed effect</i> (efek tetap)	Makalah ini mengkaji peran kesehatan dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan inklusif di 14 negara Afrika terpilih dari tahun 1995 hingga 2012 dengan menggunakan metode Efek Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan dari sektor kesehatan memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif di Afrika.

		<i>real net official development assistance (RNODAO), population growth (POPg), total government expenditure (TGE) dan age dependency ratio (ADR)</i>		
4	<p>Muhammad Ferdy Firmansyah (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Isu Ketimpangan dan Lingkungan di Jawa Barat Periode 2010-2019. Sumber : <i>Jambura</i></p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi, ekonomomi basis dan lingkungan dengan variabel terikat</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hipotesis dalam ketimpangan dan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Menurut hipotesis kurva Kuznets mengenai ketimpangan, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini berpotensi mengurangi ketimpangan.</p>

	<p><i>Economic Education Journal</i>, Volume 3, No.1, Januari 2021.</p>	<p>pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>adalah pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah metode <i>Indeks Williamson</i>.</p>	<p>Namun hipotesis yang sama dalam konteks lingkungan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga dapat menyebabkan peningkatan polusi pada lingkungan.</p>
5	<p>Azwar (2016). Pertumbuhan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Sumber : Jurnal BPPK, Volume 9, No.2, Desember 2016</p>	<p>Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah, dan jumlah penduduk miskin dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi inklusif</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur juga menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Selatan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Selatan masih belum merata. Masih adanya ketimpangan ekonomi di beberapa kabupaten/kota. Dalam hal lain faktor kesehatan dan belanja daerah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Sementara faktor lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan,</p>

			metode analisis data panel.	dan jumlah penduduk miskin justru terbukti memiliki pengaruh yang negatif
6	<p>Ibnu Hidayat, Sri Mulatsih, Wiwick Rindayati (2020). The Determinans of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. Jurnal <i>Economia</i>, No.2, Oktober 2020.</p>	<p>Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini adalah PDRB berdasarkan konsumsi rumah tangga, ekspor barang/jasa, investasi asing, investasi domestik, pendapatan perkapita dan rata-rata lama sekolah, pengangguran terbuka juga impor barang/jasa dan variabel terikatnya adalah</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang ada dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Yogyakarta. Metode Kuantatif menggunakan model <i>Two Stage Least Square (2SLS)</i>.</p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif adalah PDRB berdasarkan konsumsi rumah tangga, ekspor barang/jasa, investasi asing, investasi domestik, pendapatan perkapita dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak negatif adalah pengangguran terbuka dan impor barang/jasa. Peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2% akan</p>

		pertumbuhan ekonomi inklusif.		meningkatkan produk domestik regional bruto sebesar 1.5%, menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.0%, menurunkan kemiskinan sebesar 10.7% dan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 5.5%
7	M. Mujahid Shaleh (2021). Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Sulawesi Selatan. Sumber : Jurnal Equilibrium, Volume 10, No.1, Tahun 2021.	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan ekonomi (rasio gini), dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel terikatnya adalah indeks	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif nasional melalui kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi	Hasil dari penelitian ini adalah melalui analisis indeks pembangunan inklusif bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di di Provinsi Sulawesi Selatan sudah rmasuk kedalam kategori memuaskan dengan capaian Indeks 6,00 namun masih pada level menengah dengan menempati posisi ke 15 dari 34 Provinsi Se Indonesia.

		pembangunan ekonomi ekonomi inklusif	Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model analisis desriptif	
8	Dara Ayu Niken Prabandari dan Dwi Budi Santoso (2018). Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. Sumber : Jurnal Repository Universitas Brawijaya	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah anggaran pendidikan, kesehatan, pendidikan (rata-rata lama sekolah, investasi, tenaga kerja, dan pendapatan perkapita. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan	Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung juga menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya inklusivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi inklusif di provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya terjadi. Terbukti dengan masih sedikitnya jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif.

		ekonomi inklusif.	dengan metode metode <i>Poverty Equivalent Growth Rate</i> (PEGR)	
9	<p>Fahrizal, Zamzami, Muhammad Safri (2021). Analisis pengaruh jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi. Sumber : Jurnal Paradigma Ekonomika, Volume. 16 No.1,</p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja, pendidikan dan investasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ketiga variabel bebas yaitu tenaga kerja, pendidikan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Untuk perkembangan setiap variabel rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2018 sebesar 6,23 persen, sedangkan rata-rata kesempatan kerja di Provinsi Jambi dari tahun 2000-2018 sebesar 3,26 %, investasi di Provinsi Jambi dari tahun 2000- 2018 sebesar 14,20 %,</p>

				dan angkatan tenaga kerja di Provinsi Jambi dari tahun 2000-2018 sebesar 3,08 %.
10	<p>Prabandari (2018) Analysis of the Inclusion of Economic Growth in of East Java and the Factors Affecting it. Sumber : Jurnal Repository Universitas Brawijaya</p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, investasi pendapatan perkapita, anggaran kesehatan dan rata-rata lama sekolah terhadap ekonomi inklusif</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tenaga kerja, investasi pendapatan perkapita, anggaran kesehatan dan rata-rata lama sekolah terhadap ekonomi inklusif. Metode penelitiannya adalah PEGR dan Panel</p>	<p>Hasil dari analisis penelitian ini adalah selama periode 2011-2015, indeks pertumbuhan inklusif di Jawa Timur mengalami tren penurunan. Di provinsi ini, ada tiga aspek pertumbuhan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan aspek lainnya, yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini anggaran pendidikan dan kesehatan, terbukti efektif dalam mempercepat terwujudnya</p>

				pertumbuhan ekonomi inklusif.
--	--	--	--	-------------------------------

2.3. Kerangka Penelitian

Pengertian ekonomi inklusif secara general yaitu pertumbuhan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif berlandaskan pada teori pertumbuhan ekonomi. Konsep ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dengan variabel kemiskinan, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi. Model ini bisa digunakan sebagai acuan pembangunan ekonomi yang lebih menyeluruh dan tersebar secara merata. Ekonomi inklusif dapat diukur melalui pendekatan indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Bedasarkan penelitian Ali dan Zhuang (2007), pembanangunan ekonomi inklusif menekankan terhadap penciptaan dan akses terhadap peluang ketidaksetaraan dapat muncul dari kegagalan pasar dan juga ketidakefisienan dalam kebijakan. Menurutnya, terdapat dua pilar strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi inklusif yaitu yang pertama pembangunan tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan peluang ekonomi dan yang kedua yaitu inklusif sosial untuk memastikan akses yang sama terhadap peluang. Hal ini menggambarkan bahwa peluang dan akses yang sama dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada.

Menurut para ahli disimpulkan bahwa teori kemiskinan memiliki dua paradigma yang memberikan pemahaman mengenai teori kemiskinan. Dua paradigma tersebut adalah paradigma Neo-Liberal yang berarti bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang terjadi akibat dari pilihan individu tersebut. Menurut pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Paradigma kedua yaitu, demokrasi -Sosial yang berarti paradigma ini peran negara atau pemerintah diperlukan untuk memberikan jaminan terhadap individu untuk berpartisipasi dalam transaksi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Sadono Sukirno (2017), dengan pendidikan formal akan memberikan hasil yang berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk pengembangan sumber daya manusia untuk memaksimalkan kualitas hidup sumber daya. Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur perhitungan kesuksesan pendidikan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata dari perkiraan banyak tahun yang dihabiskan oleh individu semasa hidup. penghitungan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Peningkatan AHH mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga membaik. Hal ini dapat menjadi salah satu pengukuran seberapa besar keberhasilan penerapan pertumbuhan ekonomi inklusif di suatu wilayah. Teori ini berlandaskan pada indeks pembangunan manusia.

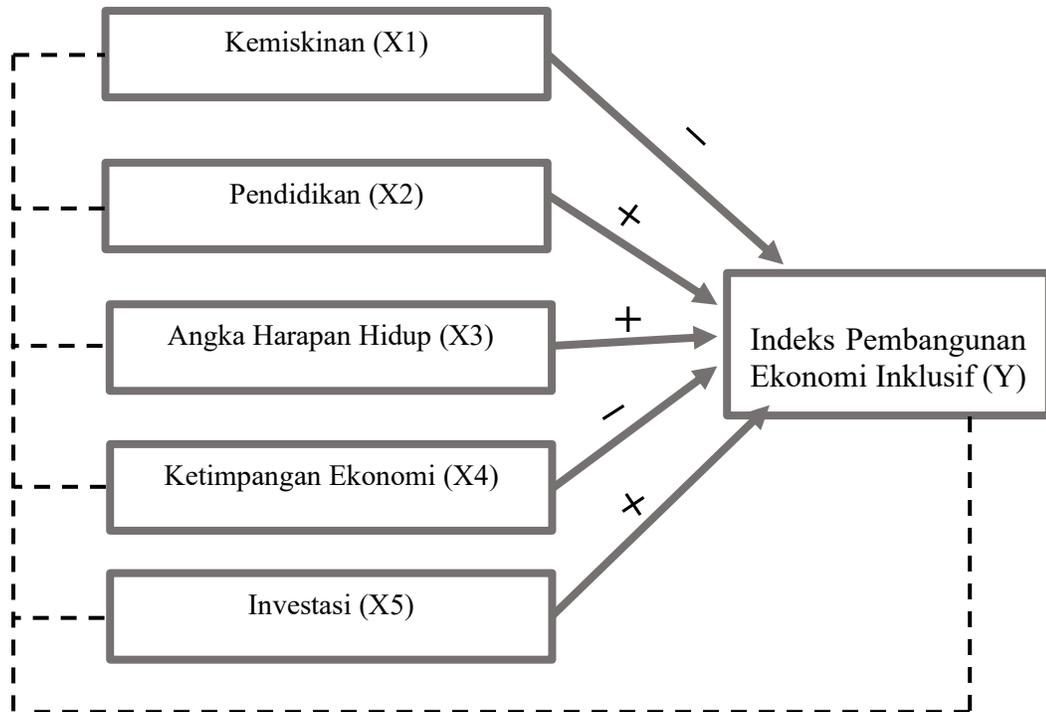
Indeks rasio gini atau biasa disebut sebagai koefisien gini merupakan alat untuk

mengukur tingkat ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Manfaat dari pengukuran ini adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi secara menyeluruh. Indeks ini dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi yang merata.

Teori Keynes berpendapat bahwa jumlah investasi tidak bergantung pada pengembalian akan tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat suku bunga dan inflasi, jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja melainkan beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi.

Berdasarkan berbagai teori yang relevan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian, maka kerangka berfikir yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Kerangka penelitian diatas menggambarkan variabel kemiskinan, pendidikan, angka harapan hidup, ketimpangan ekonomi dan investasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Karena setiap asumsi yang digambarkan menunjukan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara dari permasalahan penelitian yang penulis kaji. Akan tetapi penelitian yang kaji masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kemiskinan, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh terhadap ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan hipotesis berdasarkan kerangka penelitian yang diteliti :

- a. Hubungan Kemiskinan (JPM) terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)

Hipotesis (H1) : Kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu semakin tingginya kemiskinan maka semakin menurun tingkat indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat.

Melalui upaya pemberantasan kemiskinan yang ada maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Jika kemiskinan semakin rendah, hal ini akan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.

- b. Hubungan Tingkat Pendidikan (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)

Hipotesis (H2) : Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu semakin tingginya angka rata-rata lama sekolah maka hal tersebut dapat menyokong peningkatan indeks

pembangunan ekonomi inklusif.

Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah pada setiap individu membuktikan bahwa adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.

c. Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)

Hipotesis (H3) : Angka harapan hidup memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu semakin tingginya angka harapan hidup maka hal tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif

Angka harapan hidup yang tinggi memberikan gambaran bahwa derajat kesehatan yang baik pada setiap individunya. Masyarakat yang sehat dan memiliki angka harapan hidup yang tinggi dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dapat membantu meningkatkan indeks pembangunan ekonomi yang inklusif.

d. Ketimpangan Ekonomi (IRG) terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)

Hipotesis (H4) : Ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu semakin tingginya ketimpangan ekonomi maka semakin menurun tingkat indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat.

Tingginya tingkat ekonomi maka akan memberikan pengaruh negatif

terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Melalui upaya pemberantasan ketimpangan ekonomi yang ada maka akan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi. Jika ketimpangan ekonomi semakin rendah, hal ini akan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.

- e. Investasi (PMAPMDN) terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)

Hipotesis (H5) : Investasi memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu semakin tingginya investasi maka hal tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif

Banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat, maka akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif.